

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Para pemakai data kependudukan, khususnya para perencana, pengambil kebijaksanaan, dan peneliti sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Padahal sumber data penduduk yang tersedia hanya secara periodik, yaitu Sensus Penduduk (SP) pada tahun-tahun yang berakhir dengan angka 0 (nol) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada pertengahan dua sensus atau tahun-tahun yang berakhir dengan angka 5 (lima). Sumber data kependudukan yang lain yaitu registrasi penduduk masih belum sempurna cakupannya pencatatannya sehingga datanya belum dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional.

Seperti diketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana itu disusun, tetapi juga informasi masa lampau dan yang lebih penting lagi adalah informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Data penduduk pada waktu yang lalu dan waktu kini sudah dapat diperoleh dari hasil-hasil survei dan sensus, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk pada masa yang akan datang perlu dibuat proyeksi penduduk yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang.

Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan asumsi dari tingkat perkembangan kelahiran, kematian dan perpindahan di masa yang akan datang diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen itu, dan hubungan antara satu

komponen dengan yang lain serta target yang akan dicapai atau diharapkan pada masa yang akan datang.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah beberapa kali membuat proyeksi penduduk berdasarkan data hasil Sensus Penduduk (SP) 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985 dan 1995. Proyeksi penduduk yang terakhir dibuat adalah proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2000 yang lalu. Proyeksi penduduk berdasarkan SP2000 hanya mencakup periode 2000 – 2010. Untuk keperluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang diperlukan data jumlah penduduk sampai dengan tahun 2025. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan proyeksi penduduk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Data dasar perhitungan proyeksi ini adalah data SP2000.

Proyeksi penduduk Indonesia menurut umur, jenis kelamin dan provinsi yang disajikan dalam publikasi ini merupakan angka final dan mencakup kurun waktu dua puluh lima tahun, mulai tahun 2000 sampai dengan 2025. Pembuatan proyeksi dengan kurun waktu yang panjang ini dimaksudkan agar hasilnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk perencanaan jangka panjang. Data yang dipakai untuk perhitungan proyeksi ini terutama berdasarkan hasil SP2000. Selain itu untuk menunjang dan membuat tren masa lalu, serta untuk menentukan asumsi-asumsi yang dibutuhkan, perhitungan proyeksi ini juga menggunakan data hasil-hasil sensus penduduk sebelumnya dan hasil survei kependudukan lainnya. Dengan terbitnya publikasi ini maka proyeksi-proyeksi sebelumnya yang masih mempunyai tahun rujukan yang sama dengan publikasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

1.2. Isi Publikasi

Publikasi ini disajikan secara berurutan dalam bab-bab berikut. Bab I menyajikan latar belakang dibuatnya proyeksi penduduk. Bab II membahas tentang metodologi dan asumsi yang dipakai dalam penghitungan proyeksi yang terdiri dari lima sub bab yaitu; Metode Proyeksi, Sumber Data, Evaluasi Data Dasar, Penentuan Asumsi (Fertilitas, Mortalitas, Migrasi dan Urbanisasi). Bab III menyajikan hasil perhitungan proyeksi, dan Bab IV adalah penutup.

BAB II

METODOLOGI DAN ASUMSI

2.1. Metode Proyeksi

Badan Pusat Statistik telah membuat beberapa skenario proyeksi penduduk Indonesia (2000-2025) mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi dengan dasar hasil Sensus Penduduk 2000. Proyeksi ini dibuat dengan metode komponen berdasarkan asumsi tentang kecenderungan fertilitas, mortalitas, serta perpindahan penduduk antar provinsi yang paling mungkin terjadi 25 tahun yang akan datang. Untuk proyeksi penduduk daerah perkotaan dilakukan dengan metode Urban Rural Growth Difference (URGD), yaitu dengan menggunakan selisih pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan penduduk daerah perdesaan. Pada tahap pertama, dihitung proyeksi penduduk Indonesia, kemudian proyeksi penduduk per provinsi. Jika proyeksi penduduk per provinsi ini dijumlahkan, maka hasilnya tidak akan sama dengan proyeksi penduduk Indonesia, sehingga untuk menyamakannya dilakukan iterasi, dengan penduduk Indonesia sebagai patokan. Pada tahap terakhir baru dilakukan perhitungan proyeksi penduduk daerah perkotaan. Kemudian, proyeksi tersebut dibahas dalam tim teknis yang dibentuk oleh BPS, selanjutnya hasil pembahasan tersebut dibahas lebih lanjut dalam rapat tim yang terdiri dari para pejabat dari Bappenas, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Kesehatan, Badan Pusat Statistik dan instansi-instansi lain yang terkait. Dalam rapat tersebut selain dilakukan diskusi-diskusi teknis juga diputuskan bahwa untuk perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) perlu dibuat suatu proyeksi penduduk yang bersifat resmi yang dapat dijadikan acuan oleh semua instansi pemerintah dalam menyusun perencanaannya masing-masing.

Menentukan asumsi merupakan kunci perhitungan proyeksi penduduk. Biasanya asumsi mengenai kecenderungan dari tingkat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi ketiga komponen laju pertumbuhan tersebut di atas. Tetapi informasi

ini belum cukup, karena harus dilengkapi dengan pandangan para pakar dan para pengambil keputusan (decision maker) yang berwawasan luas ke masa yang akan datang mengenai masalah kependudukan. Masukan dari pertemuan pejabat tersebut di atas menjadi pegangan tim teknis BPS dalam menentukan asumsi yang dipakai dalam perhitungan proyeksi.

2.2. Sumber Data

Meski tersedia berbagai sumber data yang dapat digunakan untuk melihat gambaran tentang pola tingkat kelahiran di Indonesia, namun untuk keperluan proyeksi ini, sumber data yang digunakan adalah Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990 dan 2000 (SP71, SP80, SP90 dan SP2000), Survei Penduduk Antar Sensus 1985, 1995 (SUPAS85 dan SUPAS95). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menjaga “konsistensi” data serta kesamaan metodologi dan definisi yang dipakai. Dengan demikian data yang akan dijabarkan dari masa lalu hingga perkiraan di masa yang akan datang tidak mengandung penyimpangan yang disebabkan oleh perbedaan metodologi dan definisi.

2.3. Evaluasi Data Dasar

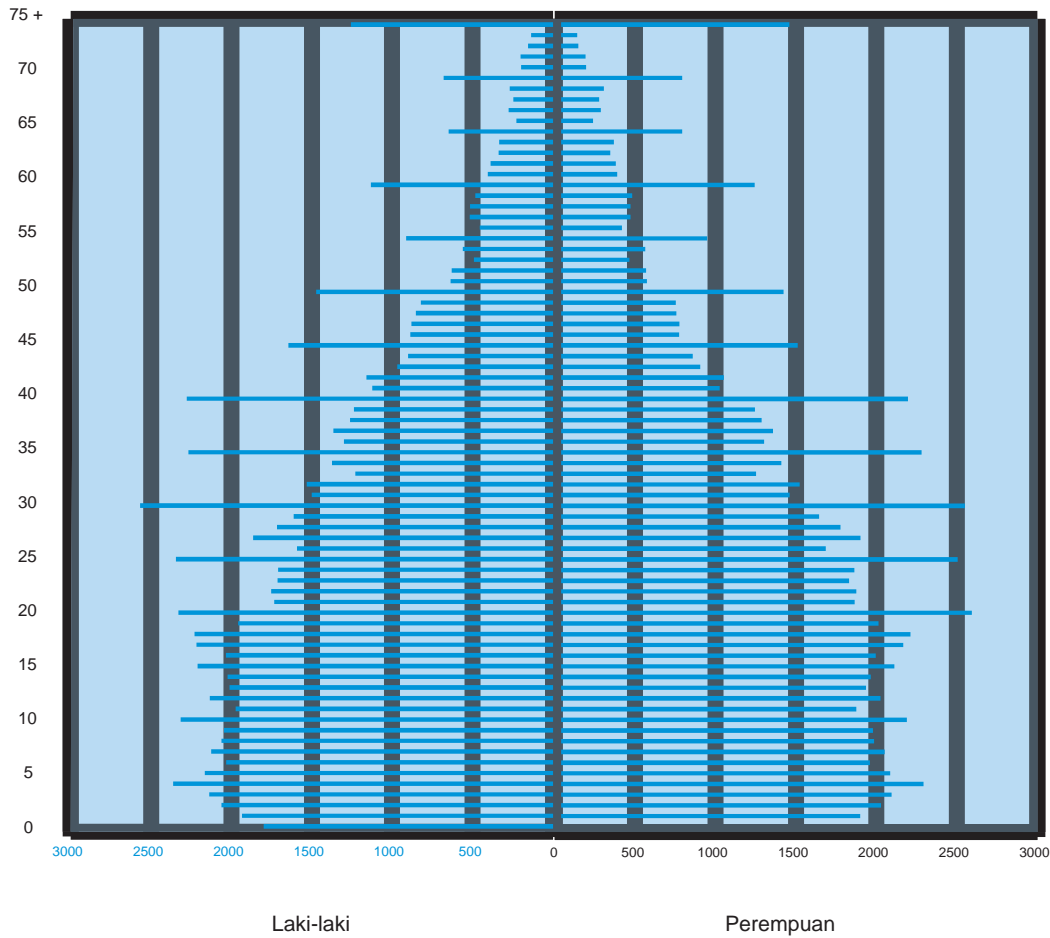
2.3.1. Evaluasi Data Umur dan Jenis Kelamin

Data yang diperoleh dari hasil sensus dan survei biasanya masih mengandung kesalahan, walaupun telah diusahakan agar kesalahan tersebut tidak terjadi atau sekecil mungkin. Kesalahan yang paling sering ditemukan adalah kurang tepatnya pelaporan umur. Kesalahan ini sering terjadi, antara lain karena banyak penduduk terutama di daerah perdesaan yang tidak melaporkan umur dengan benar. Hal ini disebabkan penduduk tersebut tidak mengetahui tanggal kelahirannya atau umurnya, sehingga pelaporan umurnya hanya berdasarkan perkiraan sendiri atau perkiraan pencacah. Ada pula penduduk yang mengetahui umurnya secara pasti tetapi karena alasan-alasan tertentu cenderung melaporkan umurnya menjadi lebih tua atau lebih muda.

Salah satu data dasar yang dibutuhkan untuk membuat proyeksi penduduk dengan metode komponen adalah jumlah penduduk yang dirinci menurut umur dan jenis kelamin. Oleh karena itu untuk keperluan proyeksi ini, data dasar yang mengandung kesalahan-kesalahan tersebut perlu dievaluasi secara cermat, kemudian dilakukan perapihan (*adjustment*) dengan tujuan untuk menghapus atau memperkecil berbagai kesalahan yang ditemukan. Mengingat pentingnya data mengenai umur, maka untuk memperoleh keterangan umur yang lebih baik, dalam sensus-sensus penduduk yang lalu dan survei penduduk antar sensus telah ditempuh berbagai cara. Bagi responden yang tahu tanggal lahirnya dalam kalender Masehi, umur responden bisa langsung dihitung, sedangkan bagi responden yang tahu tanggal kelahirannya dalam kalender Islam, Jawa dan Sunda, umur responden dihitung dengan menggunakan tabel konversi kalender yang disediakan dalam buku pedoman pencacahan. Terakhir, untuk responden yang tidak tahu tanggal kelahirannya, tetap diupayakan memperoleh keterangan tentang umur dengan menghubungkan kejadian penting setempat atau nasional, atau membandingkan dengan umur orang/tokoh setempat yang diketahui waktu kelahirannya.

Walaupun berbagai usaha untuk memperoleh keterangan tentang umur sudah dilakukan namun data penduduk menurut umur dalam SP2000 masih tidak terlepas dari kesalahan dalam pelaporan. Kesalahan yang terjadi antara lain karena adanya kebiasaan penduduk, terutama yang tidak tahu tanggal lahirnya, melaporkan umurnya pada tahun-tahun yang berakhiran 0 dan 5. Masalah ini jelas terlihat dalam piramida penduduk Indonesia hasil SP2000, penduduk yang umurnya berakhiran 0 dan 5 sangat menonjol jika dibandingkan dengan umur sekitarnya (Gambar 2.1). Di samping itu, seperti telah disebutkan di atas, kesalahan juga terjadi ketika penduduk yang tahu umurnya secara pasti tetapi, karena alasan tertentu, melaporkan umurnya lebih tua atau lebih muda dari yang sebenarnya.

Gambar 2.1. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2000
(Dalam Ribuan)



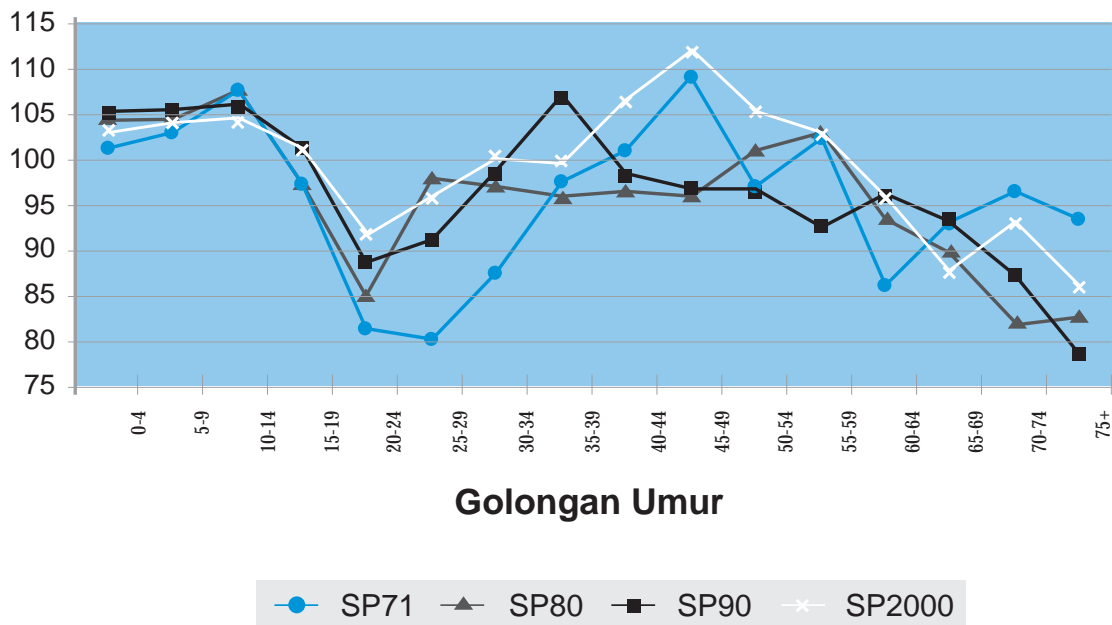
Kesalahan pelaporan umur juga dapat dilihat pada data Rasio Jenis Kelamin (RJK) menurut umur hasil SP2000. Kalau pelaporan umur baik, RJK pada suatu umur tertentu tidak berbeda besar dengan umur yang disekitarnya. Pada usia 0-4 tahun biasanya sedikit di atas 100, setelah umur tersebut RJK turun secara teratur dan mencapai nilai di bawah 100 pada usia tua. Gambaran seperti ini tidak terlihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2, karena RJK berfluktuasi naik turun tidak

menentu dan yang cukup menarik adalah RJK pada kelompok usia 20-24 tahun, 25-29 tahun dan 35-39 tahun sangat rendah. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa hal ini karena mobilitas laki-laki pada usia tersebut sangat besar, sehingga banyak yang lewat cacah pada waktu pencacahan.

Tabel 2.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Golongan Umur Tahun 1971-2000

<i>Golongan Umur (Tahun)</i>	<i>1971</i>	<i>1980</i>	<i>1990</i>	<i>2000</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
<i>0-4</i>	<i>101,2</i>	<i>104,3</i>	<i>105,2</i>	<i>102,9</i>
<i>5-9</i>	<i>103,1</i>	<i>104,2</i>	<i>105,6</i>	<i>103,7</i>
<i>10-14</i>	<i>107,7</i>	<i>107,6</i>	<i>105,8</i>	<i>104,7</i>
<i>15-19</i>	<i>97,4</i>	<i>96,7</i>	<i>101,2</i>	<i>101,4</i>
<i>20-24</i>	<i>81,3</i>	<i>85,1</i>	<i>88,7</i>	<i>92,2</i>
<i>25-29</i>	<i>80,4</i>	<i>97,9</i>	<i>91,3</i>	<i>96,0</i>
<i>30-34</i>	<i>87,6</i>	<i>97,1</i>	<i>98,8</i>	<i>100,1</i>
<i>35-39</i>	<i>97,6</i>	<i>96,1</i>	<i>107,3</i>	<i>99,5</i>
<i>40-44</i>	<i>100,9</i>	<i>96,5</i>	<i>98,5</i>	<i>106,6</i>
<i>45-49</i>	<i>109,2</i>	<i>96,0</i>	<i>96,9</i>	<i>111,4</i>
<i>50-54</i>	<i>97,0</i>	<i>101,0</i>	<i>96,8</i>	<i>105,5</i>
<i>55-59</i>	<i>102,4</i>	<i>103,0</i>	<i>92,5</i>	<i>103,1</i>
<i>60-64</i>	<i>86,2</i>	<i>93,4</i>	<i>96,2</i>	<i>95,3</i>
<i>65-69</i>	<i>92,5</i>	<i>89,8</i>	<i>93,6</i>	<i>87,8</i>
<i>70-74</i>	<i>96,6</i>	<i>81,9</i>	<i>87,3</i>	<i>93,2</i>
<i>75+</i>	<i>93,6</i>	<i>82,3</i>	<i>78,5</i>	<i>86,2</i>
<i>Jumlah</i>	<i>97,2</i>	<i>98,8</i>	<i>99,4</i>	<i>100,6</i>

Gambar 2.2. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia



2.3.1. Perapihan Umur

Perapihan umur perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan yang ada dalam data. Jika perapihan umur tidak dilakukan maka kesalahan-kesalahan itu akan terbawa ke dalam perhitungan proyeksi, sehingga akan mempengaruhi jumlah dan struktur umur penduduk dalam periode proyeksi tersebut. Dalam melakukan perapihan umur kesulitan yang dihadapi adalah tidak diketahui secara pasti letak kesalahan-kesalahan yang ada, sehingga sulit menentukan umur-umur mana yang sudah pasti salah dan mana yang benar, sehingga perapihan dilakukan untuk semua kelompok umur.

Perapihan data dasar penduduk menurut umur dan jenis kelamin dilakukan dalam tiga tahapan yang berbeda. Pertama, merapihkan data penduduk umur (10-64) tahun. Kedua, merapihkan data penduduk umur 65 tahun ke atas, tahap terakhir adalah merapihkan data penduduk umur (0-9) tahun. Masing-masing tahap perapihan data dasar dilakukan dengan metode yang berbeda.

Tahap pertama, menggunakan metode dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN, 1956) yang disusun dalam paket komputer *Micro Computer Programs for Demographics Analysis* (MCPDA). Secara umum formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$${}_5P_x^* = 1/16 (-{}_5P_{x-10} + 4 {}_5P_{x-5} + 10 {}_5P_x + 4 {}_5P_{x+5} - {}_5P_{x+10})$$

${}_5P_x^*$ = Jumlah penduduk yang telah dirapihkan menurut kelompok umur 5 tahunan

${}_5P_x$ = Jumlah penduduk dari data dasar menurut kelompok umur 5 tahunan

Hasil perapihan penduduk menurut jenis kelamin pada kelompok umur 10-64 tahun menggambarkan keadaan pada tanggal 30 Juni 2000 (*Census Date SP2000*) yang digunakan sebagai dasar I perhitungan proyeksi.

Tahap kedua adalah perapihan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas, menggunakan distribusi umur penduduk 65 tahun ke atas dari suatu negara yang penduduknya sudah stabil. Kelompok penduduk ini tidak besar pengaruhnya terhadap hasil proyeksi karena jumlahnya relatif kecil dan dalam waktu relatif singkat akan berkurang menjadi nol.

Tahap terakhir adalah merapihkan penduduk yang berumur 0-4 dan 5-9 tahun. Jumlah penduduk kelompok ini, terutama yang berumur 0 dan 1 tahun, jauh lebih kecil daripada yang diharapkan dan diduga karena lewat cacah. Untuk merapihkannya diperlukan data angka kelahiran total (TFR) masa lampau yang menggambarkan keadaan paling tidak 10 tahun sebelum pencacahan, jumlah dan susunan umur wanita usia subur, serta tingkat kematian dalam kurun waktu yang sama.

2.4. Penentuan Asumsi

Menentukan asumsi merupakan kunci perhitungan proyeksi penduduk. Biasanya asumsi mengenai kecenderungan tiga komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu, tingkat kelahiran,

kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi ketiga komponen itu. Namun begitu, informasi ini belum cukup, karena harus dilengkapi dengan kecenderungan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang akibat pelaksanaan kebijakan pembangunan sektor yang terkait dengan masalah kependudukan. Hal ini diwakili oleh pandangan dan kesepakatan para pakar, para penyusun kebijakan dan para pengambil keputusan. Masukan tersebut di atas menjadi pegangan tim teknis BPS dalam menentukan asumsi proyeksi. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 disusun dengan asumsi sebagai berikut:

2.4.1. Asumsi Fertilitas

Angka kelahiran Total (TFR) Indonesia menurun sesuai dengan tren di masa lampau, dan diproyeksikan akan mencapai Net Reproduction Rate (NRR) =1 atau setara TFR=2,1 pada tahun 2015 dengan menggunakan rumus fungsi logistik:

$$Y = L + \frac{k}{1 + be^{at}}$$

dimana:

- Y = Perkiraan TFR
- L = Perkiraan asymtot bawah TFR pada saat NRR=1
- k = Suatu besaran (konstanta), untuk menentukan asymtot atas
- a dan b = Koefisien kurva logistik
- t = Waktu sebagai variabel bebas
- e = Konstanta eksponensial

Dengan demikian TFR Indonesia turun dari 2,344 pada periode 1996-1999 menjadi 2,072 pada periode 2020-2025.

TFR di setiap provinsi diasumsikan menurun dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan tren di masa lampau masing-masing provinsi dan diproyeksikan dengan menggunakan rumus fungsi logistik seperti proyeksi TFR Indonesia. Selain menggunakan kecenderungan tingkat fertilitas di masa lampau, juga digunakan target pencapaian tingkat fertilitas di masa yang akan datang yang didapat dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Seperti halnya pada tingkat nasional, apabila provinsi telah mencapai situasi NRR=1 atau setara TFR=2,1, maka kecenderungan TFR akan ditahan/dipagu pada angka 2,1 tersebut. Untuk provinsi-provinsi yang telah mencapai NRR=1 atau setara TFR=2,1 dan bahkan telah berada di bawah nilai “*replacement level*” tersebut, TFR akan dibuat konstan atau tidak dilanjutkan penurunannya sampai level fertilitas paling rendah 1,2 anak per wanita sebagaimana pengalaman level fertilitas pada negara maju.

2.4.1. Asumsi Mortalitas

Angka Kematian Bayi (IMR) Indonesia menurun sesuai dengan tren di masa lampau dan diproyeksikan akan mencapai IMR = 20 pada tahun 2015, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) dengan menggunakan rumus fungsi logistik.

$$Y = L + \frac{k}{1 + be^{at}}$$

dimana:

- Y = Perkiraan IMR
- L = Perkiraan asymtot bawah
- k = Suatu besaran, dimana $k+L=180$ adalah asymtot atas
- a dan b = koefisien kurva logistik
- t = waktu sebagai variabel bebas
- e = konstanta eksponensial

Tabel 2.2. *Estimasi Angka Kelahiran Total (TFR) menurut Provinsi Tahun 2000-2025*

Provinsi	TFR				
	2000-2005 (2002)	2005-2010 (2007)	2010-2015 (2012)	2015-2020 (2017)	2020-2025 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Nanggroe Aceh Darussalam	2,617	2,411	2,279	2,197	2,146
12. Sumatera Utara	2,785	2,527	2,341	2,208	2,115
13. Sumatera Barat	2,690	2,459	2,297	2,187	2,112
14. Riau	2,598	2,387	2,245	2,150	2,088
15. Jambi	2,564	2,368	2,232	2,140	2,078
16. Sumatera Selatan	2,537	2,291	2,125	2,100	2,100
17. Bengkulu	2,446	2,243	2,118	2,043	1,999
18. Lampung	2,577	2,349	2,201	2,107	2,049
19. Kep. Bangka Belitung	2,388	2,217	2,115	2,055	2,021
31. DKI Jakarta	1,562	1,527	1,513	1,507	1,505
32. Jawa Barat	2,341	2,218	2,147	2,106	2,083
33. Jawa Tengah	2,291	2,181	2,111	2,066	2,038
34. DI Yogyakarta	1,428	1,373	1,383	1,377	1,375
35. Jawa Timur	1,712	1,662	1,637	1,624	1,617
36. Banten	2,608	2,399	2,257	2,163	2,100
51. Bali	1,672	1,629	1,620	1,614	1,612
52. Nusa Tenggara Barat	2,792	2,503	2,312	2,189	2,112
53. Nusa Tenggara Timur	3,089	2,742	2,472	2,270	2,124
61. Kalimantan Barat	2,753	2,488	2,301	2,172	2,085
62. Kalimantan Tengah	2,439	2,259	2,157	2,100	2,069
63. Kalimantan Selatan	2,294	2,180	2,110	2,068	2,043
64. Kalimantan Timur	2,373	2,234	2,146	2,091	2,057
71. Sulawesi Utara	1,986	1,909	1,870	1,851	1,841
72. Sulawesi Tengah	2,498	2,313	2,204	2,141	2,105
73. Sulawesi Selatan	2,413	2,268	2,178	2,122	2,089
74. Sulawesi Tenggara	2,942	2,617	2,391	2,240	2,142
75. Gorontalo	2,388	2,259	2,180	2,133	2,104
81. Maluku	3,020	2,751	2,565	2,440	2,356
82. Maluku Utara	2,998	2,731	2,549	2,428	2,349
94. Papua	3,002	2,761	2,589	2,468	2,385
INDONESIA	2,276	2,177	2,121	2,090	2,072

Dengan demikian, IMR Indonesia akan turun dari 47 pada tahun 1996 menjadi 15 pada tahun 2022.

Sedangkan IMR di setiap provinsi menurun dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan tren di masa lampau masing-masing provinsi dan diproyeksikan dengan menggunakan rumus fungsi logistik seperti proyeksi TFR Indonesia. Selain menggunakan data kecenderungan tingkat mortalitas di masa lampau, juga digunakan informasi mengenai target pencapaian tingkat mortalitas di masa yang akan datang yang didapat dari Departemen Kesehatan. Khusus untuk perkiraan tingkat mortalitas di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, selain berdasarkan tingkat mortalitas waktu lampau juga dipertimbangkan tingkat mortalitas pasca tsunami (Desember 2004).

2.4.1. Asumsi Migrasi

Migrasi Internasional neto dapat diabaikan (diasumsikan sama dengan nol), karena orang yang keluar-masuk Indonesia diperkirakan seimbang dan relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.

Sedangkan asumsi pola migrasi provinsi dianggap sama dengan pola migrasi data dasar yaitu pola migrasi berdasarkan data SP2000. Pola migrasi yang dipakai adalah pola migrasi risen tahun 1995-2000 dan dihitung dengan metode *Age Specific Net Migration Rate* (ASNMR) menurut umur dan jenis kelamin.

ASNMR untuk penduduk 5 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan dihitung dengan rumus:

$$ASNMR_i = Mig-In_i - Mig-Out_i / (5 \times P_{i \text{ mid } 95-00}) \times 1000$$

dimana :

Mig-In_i = Migrasi masuk di provinsi i

Mig-Out_i = Migrasi keluar di provinsi i

P_{i mid 95-00} = Penduduk pertengahan tahun 1995-2000

Tabel 2.3 *Estimasi Angka Kematian Bayi (IMR) menurut Provinsi Tahun 2000-2025*

Provinsi	IMR				
	2000-2005 (2002)	2005-2010 (2007)	2010-2015 (2012)	2015-2020 (2017)	2020-2025 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Nanggroe Aceh Darussalam	39	39	32	25	19
12. Sumatera Utara	34	27	21	17	14
13. Sumatera Barat	41	32	24	19	15
14. Riau	36	28	22	17	14
15. Jambi	40	32	26	22	19
16. Sumatera Selatan	40	31	24	19	16
17. Bengkulu	41	33	26	21	17
18. Lampung	36	28	22	18	15
19. Kep. Bangka Belitung	41	32	26	21	18
31. DKI Jakarta	18	14	12	10	9
32. Jawa Barat	42	32	25	21	17
33. Jawa Tengah	33	25	20	16	14
34. DI Yogyakarta	18	14	12	10	9
35. Jawa Timur	37	28	22	17	15
36. Banten	50	39	31	25	22
51. Bali	26	20	16	13	12
52. Nusa Tenggara Barat	66	51	39	31	26
53. Nusa Tenggara Timur	44	35	27	22	19
61. Kalimantan Barat	44	34	27	23	20
62. Kalimantan Tengah	37	28	23	20	18
63. Kalimantan Selatan	52	40	31	25	21
64. Kalimantan Timur	30	23	18	14	12
71. Sulawesi Utara	21	16	13	11	9
72. Sulawesi Tengah	51	40	32	26	21
73. Sulawesi Selatan	43	33	25	20	17
74. Sulawesi Tenggara	40	32	26	21	19
75. Gorontalo	43	33	26	22	19
81. Maluku	47	37	29	24	20
82. Maluku Utara	56	43	33	27	22
94. Papua	44	34	27	22	19
INDONESIA	36	28	23	18	15

Sedangkan ASNMR untuk penduduk 0-4 tahun dihitung dengan rumus :

$$\text{ASNMR}_{0-4}^P = \frac{0,25 \times M_{15-49}^P \times 100/205}{5 \times P_{0-4}^P} \times 1000$$

$$\text{ASNMR}_{0-4}^L = \frac{0,25 \times M_{15-49}^P \times 105/205}{5 \times P_{0-4}^L} \times 1000$$

dimana :

M_{15-49}^P = jumlah migran perempuan umur 15-49 tahun

P_{0-4}^P = jumlah penduduk perempuan umur 0-4 tahun

P_{0-4}^L = jumlah penduduk perempuan umur 0-4 tahun

Tabel 2.4. Migrasi Neto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Laki-laki

Provinsi/Kelompok Umur	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	34-39
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11 Nanggroe Aceh Darussalam	-7,00	-10,43	-11,86	-15,45	-17,53	-14,11	-12,87	-10,59
12 Sumatera Utara	-3,52	-1,97	-1,38	-3,28	-14,01	-10,87	-6,70	-3,64
13 Sumatera Barat	-5,74	-2,02	-2,22	-6,63	-20,72	-18,38	-10,59	-5,11
14 Riau	18,60	12,76	9,93	17,29	49,56	42,37	29,70	18,08
15 Jambi	1,48	2,04	0,92	1,06	3,02	7,18	6,57	5,03
16 Sumatera Selatan	-0,25	1,35	1,26	-0,23	-3,03	-0,13	0,87	0,79
17 Bengkulu	3,19	3,43	3,09	4,69	8,14	10,66	9,03	6,23
18 Lampung	-0,85	0,44	0,71	-0,60	-4,87	0,05	1,79	2,11
19 Kep. Bangka Belitung	-0,66	2,23	0,50	-0,67	-3,92	6,17	6,86	4,12
31 DKI Jakarta	3,08	-22,70	-14,38	3,75	24,61	4,61	-26,66	-31,53
32 Jawa Barat	3,83	3,68	2,56	3,09	8,54	6,34	9,11	6,93
33 Jawa Tengah	-10,25	-1,35	-0,73	-9,74	-35,42	-23,90	-12,55	-7,24
34 DI Yogyakarta	5,82	0,57	0,81	19,98	49,50	-7,25	-5,96	-0,60
35 Jawa Timur	-3,81	-3,18	-2,11	-4,88	-12,19	-8,72	-4,74	-2,07
36 Banten	9,27	6,92	6,13	10,02	23,38	17,88	15,96	12,84
51 Bali	2,90	0,11	-0,68	4,16	9,98	7,85	5,15	2,73
52 Nusa Tenggara Barat	0,17	0,48	0,55	-0,57	-2,66	0,66	1,50	1,26
53 Nusa Tenggara Timur	-0,91	-0,40	-0,71	-2,26	-7,94	-4,47	-2,78	-1,81
61 Kalimantan Barat	0,04	0,54	0,02	-0,56	0,18	1,27	1,72	1,01
62 Kalimantan Tengah	8,69	9,87	8,35	10,87	20,69	24,03	22,36	16,77
63 Kalimantan Selatan	1,39	1,50	0,94	1,78	5,25	4,50	3,91	1,83
64 Kalimantan Timur	7,17	6,00	4,58	9,84	24,52	22,74	14,76	8,93
71 Sulawesi Utara	0,79	1,73	1,47	1,80	1,40	0,89	1,65	2,04
72 Sulawesi Tengah	2,89	4,69	3,98	4,81	6,67	8,86	8,20	6,45
73 Sulawesi Selatan	-1,81	-1,97	-1,57	-2,25	-4,71	-6,45	-5,74	-3,78
74 Sulawesi Tenggara	5,87	11,78	10,33	10,90	12,47	16,38	16,51	14,38
75 Gorontalo	-4,46	-5,14	-5,47	-7,56	-11,72	-9,43	-8,00	-5,72
81 Maluku	-7,64	-14,32	-13,81	-15,48	-20,16	-19,77	-18,61	-16,82
82 Maluku Utara	-2,74	-3,86	-2,91	-3,95	-5,33	-3,78	-6,21	-6,02
94 Papua	2,45	2,45	2,45	3,81	10,61	10,15	6,09	3,37

Tabel 2.4. Migrasi Neto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Laki-laki (Lanjutan)

Provinsi/Kelompok Umur	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11 Nanggroe Aceh Darussalam	-11,38	-10,26	-8,43	-8,95	-8,09	-7,31	-7,71	-12,90
12 Sumatera Utara	-2,42	-1,84	-1,68	-1,18	-1,28	-0,87	-0,96	-1,78
13 Sumatera Barat	-3,75	-3,45	-3,74	-2,94	-2,44	-2,59	-2,95	-3,29
14 Riau	14,03	11,66	9,15	6,74	6,70	5,99	6,70	9,13
15 Jambi	3,51	2,86	2,13	1,00	0,63	0,73	0,57	-0,54
16 Sumatera Selatan	0,93	1,16	1,15	1,08	1,48	1,22	1,43	1,19
17 Bengkulu	5,16	4,20	3,91	3,05	3,35	2,79	2,39	2,57
18 Lampung	2,01	2,25	1,91	2,17	2,16	2,17	2,26	2,28
19 Kep. Bangka Belitung	1,85	1,13	1,18	0,09	0,43	0,06	0,83	1,18
31 DKI Jakarta	-22,70	-18,43	-12,61	-13,81	-13,30	-10,81	-11,22	-19,57
32 Jawa Barat	4,58	4,19	2,81	3,65	3,27	2,63	3,03	5,18
33 Jawa Tengah	-5,41	-5,06	-3,83	-2,56	-3,06	-2,14	-3,10	-5,83
34 DI Yogyakarta	-0,51	-0,64	-0,40	1,42	-0,22	-0,47	-1,13	-2,90
35 Jawa Timur	-1,06	-0,51	-0,28	0,11	0,30	0,28	0,09	-0,49
36 Banten	9,45	8,40	7,22	6,84	5,42	5,61	6,29	5,74
51 Bali	1,73	1,23	0,41	0,32	-0,19	-0,05	-0,31	0,10
52 Nusa Tenggara Barat	0,87	0,76	0,90	0,55	0,42	0,28	0,76	-1,54
53 Nusa Tenggara Timur	-1,51	-1,19	-0,86	-0,54	-0,67	-0,52	-0,71	-0,41
61 Kalimantan Barat	0,54	0,12	-0,16	-0,55	-0,74	-0,58	-0,66	-0,40
62 Kalimantan Tengah	14,26	12,72	11,65	7,98	6,83	5,54	5,15	3,91
63 Kalimantan Selatan	1,28	1,26	0,34	0,35	0,68	0,12	0,67	1,07
64 Kalimantan Timur	6,77	5,69	5,28	3,49	4,49	3,21	5,03	3,49
71 Sulawesi Utara	1,89	1,88	1,77	1,70	1,37	1,72	0,73	1,02
72 Sulawesi Tengah	5,53	4,92	4,96	3,48	4,30	3,92	4,24	1,76
73 Sulawesi Selatan	-3,19	-2,52	-2,33	-1,97	-2,03	-1,53	-1,28	-1,35
74 Sulawesi Tenggara	12,54	11,24	10,37	8,69	9,15	8,54	7,84	8,22
75 Gorontalo	-5,42	-4,25	-4,20	-3,81	-4,93	-3,94	-3,94	-4,96
81 Maluku	-13,73	-12,86	-11,84	-10,73	-9,14	-8,44	-7,10	-6,81
82 Maluku Utara	-5,09	-5,25	-4,81	-4,75	-5,32	-3,48	-2,32	-3,06
94 Papua	3,60	2,32	2,56	1,60	2,33	1,21	2,81	-3,18

Tabel 2.5. Migrasi Neto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Perempuan

Provinsi/Kelompok Umur	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	34-39
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11 Nanggroe Aceh Darussalam	-6,99	-10,50	-11,78	-14,87	-14,41	-12,09	-10,77	-10,28
12 Sumatera Utara	-3,58	-1,92	-1,42	-3,88	-16,88	-9,07	-4,14	-2,16
13 Sumatera Barat	-5,77	-1,97	-2,15	-6,36	-26,09	-15,91	-6,46	-3,57
14 Riau	18,28	12,80	9,75	23,68	67,00	36,92	20,37	13,33
15 Jambi	1,50	1,88	0,43	0,17	2,79	5,76	3,94	2,18
16 Sumatera Selatan	-0,25	1,35	1,19	-1,25	-4,00	0,08	0,92	1,35
17 Bengkulu	3,19	3,60	2,99	4,66	5,27	8,81	6,69	4,24
18 Lampung	-0,88	0,25	0,28	-4,99	-6,10	-0,29	1,39	1,52
19 Kep. Bangka Belitung	-0,64	2,42	0,60	-4,06	-8,48	3,47	3,64	2,00
31 DKI Jakarta	2,28	-18,47	-8,94	20,40	21,21	-3,17	-17,49	-13,73
32 Jawa Barat	2,19	2,06	1,69	2,44	4,73	4,16	4,39	2,79
33 Jawa Tengah	-5,49	-0,83	-0,92	-11,28	-18,31	-8,32	-3,87	-2,60
34 DI Yogyakarta	6,28	0,07	0,78	18,57	24,22	-6,11	-0,81	0,07
35 Jawa Timur	-2,58	-2,05	-1,50	-3,86	-6,78	-4,41	-2,45	-1,29
36 Banten	8,20	7,09	6,37	13,38	19,20	16,80	14,96	10,89
51 Bali	2,93	0,27	-0,46	3,29	7,40	5,47	3,17	1,77
52 Nusa Tenggara Barat	0,17	0,32	0,54	-0,27	-1,33	0,89	1,26	0,98
53 Nusa Tenggara Timur	-0,96	-0,47	-0,69	-2,25	-4,59	-1,59	-1,16	-1,13
61 Kalimantan Barat	0,06	0,71	0,04	-1,75	-0,99	1,82	1,76	0,91
62 Kalimantan Tengah	5,45	6,01	4,69	5,88	10,54	13,38	10,90	8,26
63 Kalimantan Selatan	1,80	1,87	1,04	1,66	4,50	4,20	3,10	1,57
64 Kalimantan Timur	6,94	5,05	4,00	8,64	17,87	16,37	9,78	6,31
71 Sulawesi Utara	0,85	1,82	1,51	1,47	0,52	0,53	1,54	1,76
72 Sulawesi Tengah	2,64	4,49	2,98	2,99	4,42	5,93	5,57	3,62
73 Sulawesi Selatan	-2,88	-2,83	-2,34	-3,40	-6,15	-6,89	-4,74	-3,64
74 Sulawesi Tenggara	2,45	4,75	3,99	3,66	4,15	5,39	4,82	3,99
75 Gorontalo	-4,55	-4,70	-5,43	-7,26	-10,73	-8,55	-7,25	-5,55
81 Maluku	-8,00	-14,32	-14,62	-16,68	-20,02	-17,18	-15,69	-13,59
82 Maluku Utara	-2,81	-4,63	-3,63	-5,32	-5,39	-5,12	-7,04	-5,23
94 Papua	2,50	2,02	1,98	3,34	7,68	7,55	4,70	3,10

Tabel 2.5. Migrasi Neto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Perempuan (lanjutan)

Provinsi/Kelompok Umur	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11 Nanggroe Aceh Darussalam	-9,90	-8,60	-7,60	-6,36	-6,94	-6,56	-9,80	-13,46
12 Sumatera Utara	-1,56	-1,33	-1,29	-0,94	-0,93	-0,91	-1,03	-1,54
13 Sumatera Barat	-3,33	-3,40	-3,33	-2,56	-2,70	-2,09	-2,41	-1,95
14 Riau	9,76	7,94	7,16	5,85	6,12	5,84	7,25	7,07
15 Jambi	0,82	0,07	0,39	-0,35	-0,20	-0,90	0,92	-0,42
16 Sumatera Selatan	1,33	1,51	1,55	1,05	1,24	1,30	1,65	1,27
17 Bengkulu	3,77	2,07	2,63	2,14	2,00	2,32	2,06	2,19
18 Lampung	1,66	1,67	1,79	1,77	2,26	2,09	3,39	2,19
19 Kep. Bangka Belitung	0,65	0,27	0,56	-0,46	-0,41	-0,06	0,20	0,16
31 DKI Jakarta	-9,16	-7,63	-6,17	-6,30	-5,78	-5,99	-7,03	-13,08
32 Jawa Barat	2,22	1,89	1,78	1,54	1,25	1,41	1,50	2,12
33 Jawa Tengah	-2,06	-1,92	-1,75	-1,07	-1,06	-0,87	-1,12	-2,22
34 DI Yogyakarta	0,40	0,55	0,40	0,22	-0,36	-0,05	-0,38	-0,91
35 Jawa Timur	-0,76	-0,26	-0,16	-0,02	-0,03	-0,06	-0,14	-0,52
36 Banten	8,61	8,28	6,92	7,21	6,21	6,23	6,61	7,46
51 Bali	1,01	0,50	0,41	0,33	-0,07	0,05	0,17	0,17
52 Nusa Tenggara Barat	0,79	0,77	0,93	0,66	0,84	0,69	0,70	-1,56
53 Nusa Tenggara Timur	-0,90	-0,64	-0,79	-0,52	-0,69	-0,65	-1,09	-1,07
61 Kalimantan Barat	-0,05	-0,53	-0,65	-1,22	-1,26	-1,43	-1,12	-1,60
62 Kalimantan Tengah	6,61	5,21	3,89	2,70	2,50	1,70	1,91	1,69
63 Kalimantan Selatan	0,93	0,68	0,74	0,07	1,04	0,88	0,88	1,28
64 Kalimantan Timur	4,81	3,55	3,30	3,02	3,34	3,31	4,25	3,50
71 Sulawesi Utara	2,10	1,86	1,59	1,41	1,79	1,81	1,89	1,13
72 Sulawesi Tengah	3,07	3,16	2,77	1,45	1,72	1,47	1,19	0,22
73 Sulawesi Selatan	-3,05	-2,87	-2,70	-2,31	-2,26	-1,94	-1,77	-1,44
74 Sulawesi Tenggara	3,38	2,62	2,67	1,73	1,61	1,62	1,69	1,92
75 Gorontalo	-5,12	-4,12	-3,91	-4,12	-3,80	-4,19	-3,27	-5,37
81 Maluku	-11,17	-11,25	-9,85	-8,76	-8,12	-7,51	-8,34	-8,52
82 Maluku Utara	-5,23	-4,91	-4,30	-4,70	-4,26	-4,34	-3,91	-4,68
94 Papua	2,57	1,88	2,13	1,07	0,86	0,66	0,90	-4,62

2.4.4. Urbanisasi

Penghitungan proyeksi penduduk daerah perkotaan menggunakan rumus *Urban Rural Growth Difference* (URGD), yaitu proyeksi penduduk perkotaan berdasarkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penentuan asumsi URGD untuk provinsi dikelompokkan menjadi tiga :

URGD Tinggi, untuk provinsi yang perbedaan laju pertumbuhan antara penduduk daerah perkotaan dan daerah perdesaan (URGD) lebih dari 30 persen. Untuk kelompok provinsi dengan URGD tinggi diasumsikan terjadi penurunan URGD sebesar 10 persen setiap 5 tahun. Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo.

URGD Sedang, untuk provinsi yang perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan daerah perdesaan (URGD) antara 20-30 persen. Untuk kelompok provinsi dengan URGD sedang diasumsikan terjadi penurunan URGD sebesar 7 persen setiap 5 tahun. Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

URGD Rendah, untuk provinsi yang perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan daerah perdesaan (URGD) di bawah 20 persen. Untuk kelompok provinsi dengan URGD rendah diasumsikan terjadi kenaikan URGD sebesar 5 persen setiap 5 tahun. Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Sumatra Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Rumus penghitungan penduduk daerah perkotaan dengan metode URGD adalah:

$$U' = \frac{T' + dR}{T} \times U$$

dimana:

U' = Jumlah penduduk daerah perkotaan tahun $t + 1$

U = Jumlah penduduk daerah perkotaan tahun t

R = Jumlah penduduk daerah perdesaan tahun t

d = Perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan perdesaan

T' = Jumlah penduduk total tahun $t + 1$

T = Jumlah penduduk total tahun t

Tabel 2.6. Perbedaan Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Perkotaan dan Perdesaan (URGD) per Provinsi, 2000-2025

<i>Provinsi</i>	<i>2000-2005</i>	<i>2005-2010</i>	<i>2010-2015</i>	<i>2015-2020</i>	<i>2020-2025</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<i>11 Nanggroe Aceh Darussalam</i>	<i>0,3003</i>	<i>0,2702</i>	<i>0,2432</i>	<i>0,2189</i>	<i>0,1970</i>
<i>12 Sumatera Utara</i>	<i>0,1629</i>	<i>0,1711</i>	<i>0,1796</i>	<i>0,1886</i>	<i>0,1981</i>
<i>13 Sumatera Barat</i>	<i>0,2707</i>	<i>0,2518</i>	<i>0,2342</i>	<i>0,2178</i>	<i>0,2025</i>
<i>14 Riau</i>	<i>0,3350</i>	<i>0,3015</i>	<i>0,2714</i>	<i>0,2442</i>	<i>0,2198</i>
<i>15 Jambi</i>	<i>0,2208</i>	<i>0,2053</i>	<i>0,1910</i>	<i>0,1776</i>	<i>0,1652</i>
<i>16 Sumatera Selatan</i>	<i>0,2082</i>	<i>0,1936</i>	<i>0,1800</i>	<i>0,1674</i>	<i>0,1557</i>
<i>17 Bengkulu</i>	<i>0,3116</i>	<i>0,2804</i>	<i>0,2524</i>	<i>0,2272</i>	<i>0,2044</i>
<i>18 Lampung</i>	<i>0,3862</i>	<i>0,3476</i>	<i>0,3128</i>	<i>0,2815</i>	<i>0,2534</i>
<i>19 Kep. Bangka Belitung</i>	<i>0,2082</i>	<i>0,1936</i>	<i>0,1800</i>	<i>0,1674</i>	<i>0,1557</i>
<i>31 DKI Jakarta</i>	<i>0,0083</i>	<i>0,0088</i>	<i>0,0092</i>	<i>0,0097</i>	<i>0,0101</i>
<i>32 Jawa Barat</i>	<i>0,3709</i>	<i>0,3338</i>	<i>0,3004</i>	<i>0,2704</i>	<i>0,2433</i>
<i>33 Jawa Tengah</i>	<i>0,3472</i>	<i>0,3125</i>	<i>0,2812</i>	<i>0,2531</i>	<i>0,2278</i>
<i>34 DI Yogyakarta</i>	<i>0,2874</i>	<i>0,2673</i>	<i>0,2485</i>	<i>0,2311</i>	<i>0,2150</i>
<i>35 Jawa Timur</i>	<i>0,3410</i>	<i>0,3069</i>	<i>0,2762</i>	<i>0,2486</i>	<i>0,2237</i>
<i>36 Banten</i>	<i>0,3709</i>	<i>0,3338</i>	<i>0,3004</i>	<i>0,2704</i>	<i>0,2433</i>
<i>51 Bali</i>	<i>0,3410</i>	<i>0,3069</i>	<i>0,2762</i>	<i>0,2486</i>	<i>0,2237</i>
<i>52 N T B</i>	<i>0,3410</i>	<i>0,3069</i>	<i>0,2762</i>	<i>0,2486</i>	<i>0,2237</i>
<i>53 N T T</i>	<i>0,2108</i>	<i>0,1960</i>	<i>0,1823</i>	<i>0,1695</i>	<i>0,1577</i>
<i>61 Kalimantan Barat</i>	<i>0,1704</i>	<i>0,1789</i>	<i>0,1878</i>	<i>0,1972</i>	<i>0,2071</i>
<i>62 Kalimantan Tengah</i>	<i>0,3762</i>	<i>0,3386</i>	<i>0,3047</i>	<i>0,2743</i>	<i>0,2468</i>
<i>63 Kalimantan Selatan</i>	<i>0,2473</i>	<i>0,2300</i>	<i>0,2139</i>	<i>0,1989</i>	<i>0,1850</i>
<i>64 Kalimantan Timur</i>	<i>0,2109</i>	<i>0,1961</i>	<i>0,1824</i>	<i>0,1696</i>	<i>0,1578</i>
<i>71 Sulawesi Utara</i>	<i>0,3100</i>	<i>0,2790</i>	<i>0,2511</i>	<i>0,2260</i>	<i>0,2034</i>
<i>72 Sulawesi Tengah</i>	<i>0,1171</i>	<i>0,1230</i>	<i>0,1291</i>	<i>0,1356</i>	<i>0,1423</i>
<i>73 Sulawesi Selatan</i>	<i>0,1428</i>	<i>0,1499</i>	<i>0,1574</i>	<i>0,1653</i>	<i>0,1735</i>
<i>74 Sulawesi Tenggara</i>	<i>0,1557</i>	<i>0,1635</i>	<i>0,1716</i>	<i>0,1802</i>	<i>0,1892</i>
<i>75 Gorontalo</i>	<i>0,3100</i>	<i>0,2790</i>	<i>0,2511</i>	<i>0,2260</i>	<i>0,2034</i>
<i>81 Maluku</i>	<i>0,0420</i>	<i>0,0441</i>	<i>0,0463</i>	<i>0,0486</i>	<i>0,0510</i>
<i>82 Maluku Utara</i>	<i>0,0420</i>	<i>0,0441</i>	<i>0,0463</i>	<i>0,0486</i>	<i>0,0510</i>
<i>94 Papua</i>	<i>0,0420</i>	<i>0,0441</i>	<i>0,0463</i>	<i>0,0486</i>	<i>0,0510</i>

BAB III

HASIL PERHITUNGAN

3.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,8 juta pada tahun 2000 menjadi 273,7 juta pada tahun 2025 (Tabel 3.1), Walaupun demikian, Pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, kemudian antara periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,36 persen dan 0,98 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. *Crude Birth Rate (CBR)* turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan *Crude Death Rate (CDR)* tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

Salah satu ciri dari penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 58,9 persen pada tahun 2000 menjadi 55,4 persen pada tahun 2025. Sebaliknya persentase penduduk yang tinggal di pulau-pulau lain meningkat seperti, Pulau Sumatera naik dari 21,0 persen menjadi 23,1 persen, Kalimantan naik dari 5,5 persen menjadi 6,5 persen pada periode yang sama. Selain pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk• (Tabel 3.1).

Table 3.1. Estimasi Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025 (dalam 000)

Provinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Nanggroe Aceh Darussalam	3 929,3	4 037,9	4 112,2	4 166,3	4 196,5	4 196,3
12 Sumatera Utara	11 642,6	12 452,8	13 217,6	13 923,6	14 549,6	15 059,3
13 Sumatera Barat	4 248,5	4 402,1	4 535,3	4 693,4	4 785,4	4 846,0
14 Riau	4 948,0	6 108,4	7 469,4	8 997,7	10 692,8	12 571,3
15 Jambi	2 407,2	2 657,3	2 911,7	3 164,8	3 409,0	3 636,8
16 Sumatera Selatan	6 899,1	7 526,8	8 164,0	8 780,8	9 389,6	9 960,3
17 Bengkulu	1 564,8	1 744,2	1 930,3	2 119,8	2 308,2	2 488,8
18 Lampung	6 730,8	7 291,3	7 843,0	8 377,4	8 881,0	9 330,0
19 Kep. Bangka Belitung	900,0	971,5	1 044,7	1 116,4	1 183,0	1 240,0
31 DKI Jakarta	8 361,0	8 699,6	8 981,2	9 168,5	9 262,6	9 259,9
32 Jawa Barat	35 724,0	39 066,7	42 555,3	46 073,8	49 512,1	52 740,8
33 Jawa Tengah	31 223,0	31 887,2	32 451,6	32 882,7	33 138,9	33 152,8
34 DI Yogyakarta	3 121,1	3 280,2	3 439,0	3 580,3	3 694,7	3 776,5
35 Jawa Timur	34 766,0	35 550,4	36 269,5	36 840,4	37 183,0	37 194,5
36 Banten	8 098,1	9 309,0	10 661,1	12 140,0	13 717,6	15 343,5
51 Bali	3 150,0	3 378,5	3 596,7	3 792,6	3 967,7	4 122,1
52 N T B	4 008,6	4 355,5	4 701,1	5 040,8	5 367,7	5 671,6
53 N T T	3 823,1	4 127,3	4 417,6	4 694,9	4 957,6	5 194,8
61 Kalimantan Barat	4 016,2	4 394,3	4 771,5	5 142,5	5 493,6	5 809,1
62 Kalimantan Tengah	1 855,6	2 137,9	2 439,9	2 757,2	3 085,8	3 414,4
63 Kalimantan Selatan	2 984,0	3 240,1	3 503,3	3 767,8	4 023,9	4 258,0
64 Kalimantan Timur	2 451,9	2 810,9	3 191,0	3 587,9	3 995,6	4 400,4
71 Sulawesi Utara	2 000,9	2 141,9	2 277,2	2 402,8	2 517,2	2 615,5
72 Sulawesi Tengah	2 176,0	2 404,0	2 640,5	2 884,2	3 131,2	3 372,2
73 Sulawesi Selatan	8 050,8	8 493,7	8 926,6	9 339,9	9 715,1	10 023,6
74 Sulawesi Tenggara	1 820,3	2 085,9	2 363,9	2 653,0	2 949,6	3 246,5
75 Gorontalo	833,5	872,2	906,9	937,5	962,4	979,4
81 Maluku	1 163,2	1 172,0	1 170,9	1 163,1	1 148,5	1 125,3
82 Maluku Utara	732,2	780,3	826,5	870,4	908,9	939,2
94 Papua	2 213,8	2 518,4	2 819,9	3 119,5	3 410,8	3 682,5
Indonesia	205 843,6	219 898,3	234 139,4	248 180,0	261 539,6	273 651,4

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan periode 1990-2000, maka terlihat laju pertumbuhan penduduk di beberapa provinsi ada yang naik pesat dan ada pula yang turun dengan tajam (data tidak ditampilkan). Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya turun tajam minimal sebesar 0,50 persen dibandingkan periode sebelumnya (1990-2000) adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua. Sementara, provinsi yang laju pertumbuhannya naik pesat minimal sebesar 0,40 persen dibandingkan periode sebelumnya adalah Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Tabel 3.2. memperlihatkan tiga provinsi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk minus yaitu, Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta dan Maluku. Kondisi ini kemungkinan akibat dari asumsi migrasi yang digunakan, yaitu pola migrasi menurut umur selama periode proyeksi dianggap sama dengan pola migrasi periode 1995-2000, terutama untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Maluku. Pola net migrasi kedua provinsi ini pada periode 1995-2000 adalah minus di atas 10 persen, jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi pengirim migran lainnya.

Table 3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025

<i>Provinsi</i>	<i>2000-2005</i>	<i>2005-2010</i>	<i>2010-2015</i>	<i>2015-2020</i>	<i>2020-2025</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<i>11 Nanggroe Aceh Darussalam</i>	<i>0,55</i>	<i>0,37</i>	<i>0,26</i>	<i>0,14</i>	<i>-0,001</i>
<i>12 Sumatera Utara</i>	<i>1,35</i>	<i>1,20</i>	<i>1,05</i>	<i>0,88</i>	<i>0,69</i>
<i>13 Sumatera Barat</i>	<i>0,71</i>	<i>0,60</i>	<i>0,69</i>	<i>0,39</i>	<i>0,25</i>
<i>14 Riau</i>	<i>4,30</i>	<i>4,11</i>	<i>3,79</i>	<i>3,51</i>	<i>3,29</i>
<i>15 Jambi</i>	<i>2,00</i>	<i>1,85</i>	<i>1,68</i>	<i>1,50</i>	<i>1,30</i>
<i>16 Sumatera Selatan</i>	<i>1,76</i>	<i>1,64</i>	<i>1,47</i>	<i>1,35</i>	<i>1,19</i>
<i>17 Bengkulu</i>	<i>2,19</i>	<i>2,05</i>	<i>1,89</i>	<i>1,72</i>	<i>1,52</i>
<i>18 Lampung</i>	<i>1,61</i>	<i>1,47</i>	<i>1,33</i>	<i>1,17</i>	<i>0,99</i>
<i>19 Kep. Bangka Belitung</i>	<i>1,54</i>	<i>1,46</i>	<i>1,34</i>	<i>1,17</i>	<i>0,95</i>
<i>31 DKI Jakarta</i>	<i>0,80</i>	<i>0,64</i>	<i>0,41</i>	<i>0,20</i>	<i>-0,01</i>
<i>32 Jawa Barat</i>	<i>1,81</i>	<i>1,73</i>	<i>1,60</i>	<i>1,45</i>	<i>1,27</i>
<i>33 Jawa Tengah</i>	<i>0,42</i>	<i>0,35</i>	<i>0,26</i>	<i>0,16</i>	<i>0,01</i>
<i>34 DI Yogyakarta</i>	<i>1,00</i>	<i>0,95</i>	<i>0,81</i>	<i>0,63</i>	<i>0,44</i>
<i>35 Jawa Timur</i>	<i>0,45</i>	<i>0,40</i>	<i>0,31</i>	<i>0,19</i>	<i>0,01</i>
<i>36 Banten</i>	<i>2,83</i>	<i>2,75</i>	<i>2,63</i>	<i>2,47</i>	<i>2,27</i>
<i>51 Bali</i>	<i>1,41</i>	<i>1,26</i>	<i>1,07</i>	<i>0,91</i>	<i>0,77</i>
<i>52 N T B</i>	<i>1,67</i>	<i>1,54</i>	<i>1,41</i>	<i>1,26</i>	<i>1,11</i>
<i>53 N T T</i>	<i>1,54</i>	<i>1,37</i>	<i>1,23</i>	<i>1,09</i>	<i>0,94</i>
<i>61 Kalimantan Barat</i>	<i>1,82</i>	<i>1,66</i>	<i>1,51</i>	<i>1,33</i>	<i>1,12</i>
<i>62 Kalimantan Tengah</i>	<i>2,87</i>	<i>2,68</i>	<i>2,48</i>	<i>2,28</i>	<i>2,04</i>
<i>63 Kalimantan Selatan</i>	<i>1,66</i>	<i>1,57</i>	<i>1,47</i>	<i>1,32</i>	<i>1,14</i>
<i>64 Kalimantan Timur</i>	<i>2,77</i>	<i>2,57</i>	<i>2,37</i>	<i>2,18</i>	<i>1,95</i>
<i>71 Sulawesi Utara</i>	<i>1,37</i>	<i>1,23</i>	<i>1,08</i>	<i>0,93</i>	<i>0,77</i>
<i>72 Sulawesi Tengah</i>	<i>2,01</i>	<i>1,89</i>	<i>1,78</i>	<i>1,66</i>	<i>1,49</i>
<i>73 Sulawesi Selatan</i>	<i>1,08</i>	<i>1,00</i>	<i>0,91</i>	<i>0,79</i>	<i>0,63</i>
<i>74 Sulawesi Tenggara</i>	<i>2,76</i>	<i>2,53</i>	<i>2,33</i>	<i>2,14</i>	<i>1,94</i>
<i>75 Gorontalo</i>	<i>0,91</i>	<i>0,78</i>	<i>0,67</i>	<i>0,53</i>	<i>0,35</i>
<i>81 Maluku</i>	<i>0,15</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,13</i>	<i>-0,25</i>	<i>-0,41</i>
<i>82 Maluku Utara</i>	<i>1,28</i>	<i>1,16</i>	<i>1,04</i>	<i>0,87</i>	<i>0,66</i>
<i>94 Papua</i>	<i>2,61</i>	<i>2,29</i>	<i>2,04</i>	<i>1,80</i>	<i>1,54</i>
<i>Indonesia</i>	<i>1,36</i>	<i>1,29</i>	<i>1,21</i>	<i>1,11</i>	<i>0,98</i>

3.2. Susunan Umur Penduduk

Struktur umur penduduk Indonesia masih tergolong muda, walaupun dari hasil sensus dan survei-survei yang lalu proporsi penduduk muda tersebut menunjukkan kecenderungan makin menurun. Susunan umur penduduk hasil proyeksi yang disajikan pada Tabel 3.3. sampai dengan Tabel 3.5 juga menunjukkan pola yang sama. Asumsi tentang penurunan tingkat kelahiran dan kematian Indonesia seperti diuraikan di atas sangat mempengaruhi susunan umur penduduk. Proporsi anak-anak berumur 0-14 tahun turun dari 30,7 persen pada tahun 2000 menjadi 22,8 persen pada tahun 2025 (Tabel 3.3).

Dalam kurun yang sama mereka yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 64,6 persen menjadi 68,7 persen (Tabel 3.4) dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas naik dari 4,7 persen menjadi 8,5 persen (Tabel 3.5). Perubahan susunan ini mengakibatkan beban ketergantungan (*dependency ratio*) turun dari 54,70 persen pada tahun 2000 menjadi 45,57 persen pada tahun 2025. Menurunnya rasio beban ketergantungan menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

Tabel 3.3. *Estimasi Proporsi Penduduk Umur 0-14 menurut Provinsi Tahun 2000-2025 (dalam %)*

Provinsi	Tahun					
	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
11. Nanggroe Aceh Darussalam	36,6	32,3	29,4	27,9	26,9	25,8
12. Sumatera Utara	36,5	33,2	30,0	28,0	26,6	25,3
13. Sumatera Barat	34,1	31,6	28,7	27,5	26,4	25,4
14. Riau	33,9	31,7	30,3	28,5	26,9	25,3
15. Jambi	34,3	31,6	28,4	26,8	25,4	24,1
16. Sumatera Selatan	35,4	31,3	29,0	27,0	25,8	24,6
17. Bengkulu	33,9	30,4	28,1	26,2	24,8	23,5
18. Lampung	33,8	30,8	27,5	26,0	24,6	23,3
19. Kep. Bangka Belitung	31,7	28,1	26,5	25,4	24,2	22,9
31. DKI Jakarta	26,9	25,3	22,8	22,3	21,6	20,4
32. Jawa Barat	30,3	28,1	26,5	25,3	24,2	23,1
33. Jawa Tengah	28,2	26,2	24,8	24,9	23,9	23,0
34. DI Yogyakarta	21,7	19,0	17,5	17,6	17,3	16,5
35. Jawa Timur	25,1	22,6	20,4	19,9	19,0	18,1
36. Banten	35,1	32,1	29,4	27,3	26,1	24,8
51. Bali	25,1	24,0	23,0	21,7	20,4	19,6
52. Nusa Tenggara Barat	35,7	32,6	29,5	28,0	26,5	25,2
53. Nusa Tenggara Timur	37,1	34,4	30,3	28,2	26,7	25,5
61. Kalimantan Barat	35,7	32,7	29,2	27,6	26,2	24,9
62. Kalimantan Tengah	34,2	31,0	28,1	25,5	23,9	22,5
63. Kalimantan Selatan	32,0	29,4	26,2	25,4	24,4	23,5
64. Kalimantan Timur	33,0	30,7	27,3	25,4	24,1	23,0
71. Sulawesi Utara	27,8	26,0	23,0	21,9	20,9	20,1
72. Sulawesi Tengah	34,3	31,4	27,7	25,7	24,7	23,9
73. Sulawesi Selatan	32,7	30,0	27,2	25,9	25,0	24,1
74. Sulawesi Tenggara	38,0	34,5	31,1	28,1	26,2	24,5
75. Gorontalo	32,9	31,1	27,6	26,1	25,0	24,0
81. Maluku	38,1	34,8	29,8	27,6	26,3	25,1
82. Maluku Utara	39,1	35,6	30,4	28,0	26,6	25,2
94. Papua	36,0	33,3	29,3	28,5	26,2	24,4
INDONESIA	30,7	28,3	26,0	25,0	23,9	22,8

Tabel 3.4. Estimasi Proporsi Penduduk Umur 15-64 menurut Provinsi Tahun 2000-2025 (dalam %)

Provinsi	Tahun					
	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
11. Nanggroe Aceh Darussalam	60,2	63,7	66,1	67,0	67,3	67,3
12. Sumatera Utara	60,0	63,0	65,8	67,2	67,4	67,2
13. Sumatera Barat	60,4	62,7	65,5	66,2	66,1	65,4
14. Riau	64,0	66,0	67,2	68,7	69,7	70,4
15. Jambi	62,7	65,1	68,0	69,1	69,4	69,3
16. Sumatera Selatan	61,4	65,2	67,2	68,5	68,8	68,5
17. Bengkulu	63,0	66,2	68,3	69,8	70,2	70,0
18. Lampung	62,4	65,1	68,0	68,9	69,2	68,9
19. Kep. Bangka Belitung	64,5	67,9	69,2	69,4	69,3	69,0
31. DKI Jakarta	70,7	71,8	73,6	73,0	72,4	71,9
32. Jawa Barat	65,1	67,1	68,6	69,2	69,4	69,1
33. Jawa Tengah	65,5	66,8	67,8	66,9	66,6	65,7
34. DI Yogyakarta	69,4	71,7	73,1	72,7	72,1	71,4
35. Jawa Timur	68,6	70,4	71,9	71,6	70,8	69,3
36. Banten	61,2	64,5	67,2	69,1	69,6	69,8
51. Bali	69,0	69,7	70,2	70,7	70,9	70,3
52. Nusa Tenggara Barat	60,8	63,6	66,3	67,1	67,8	68,0
53. Nusa Tenggara Timur	58,5	60,9	64,7	66,4	67,2	67,3
61. Kalimantan Barat	61,5	64,1	67,1	68,1	68,5	68,6
62. Kalimantan Tengah	63,4	66,4	68,9	71,0	71,6	71,6
63. Kalimantan Selatan	64,7	66,9	69,7	70,0	69,9	69,3
64. Kalimantan Timur	64,9	67,0	69,9	71,1	71,2	70,7
71. Sulawesi Utara	67,0	68,4	70,9	71,1	70,4	69,2
72. Sulawesi Tengah	62,7	65,3	68,6	69,9	69,9	69,5
73. Sulawesi Selatan	62,8	65,1	67,6	68,1	68,1	67,7
74. Sulawesi Tenggara	59,1	62,4	65,5	67,9	69,1	69,7
75. Gorontalo	63,9	65,2	68,1	68,6	68,5	67,9
81. Maluku	57,9	61,0	65,7	67,3	67,6	67,3
82. Maluku Utara	58,0	61,4	66,3	68,2	68,7	68,9
94. Papua	62,9	65,4	68,8	68,9	69,9	69,9
INDONESIA	64,6	66,7	68,6	69,1	69,1	68,7

Tabel 3.5. Estimasi Proporsi Penduduk Umur 65+ menurut Provinsi Tahun 2000-2025 (dalam %)

<i>Provinsi</i>	<i>Tahun</i>					
	<i>2000</i>	<i>2005</i>	<i>2010</i>	<i>2015</i>	<i>2020</i>	<i>2025</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(6)</i>
<i>11. Nanggroe Aceh Darussalam</i>	<i>3,2</i>	<i>3,9</i>	<i>4,5</i>	<i>5,1</i>	<i>5,8</i>	<i>6,9</i>
<i>12. Sumatera Utara</i>	<i>3,5</i>	<i>3,8</i>	<i>4,2</i>	<i>4,8</i>	<i>5,9</i>	<i>7,5</i>
<i>13. Sumatera Barat</i>	<i>5,5</i>	<i>5,7</i>	<i>5,8</i>	<i>6,2</i>	<i>7,5</i>	<i>9,1</i>
<i>14. Riau</i>	<i>2,1</i>	<i>2,3</i>	<i>2,5</i>	<i>2,8</i>	<i>3,4</i>	<i>4,2</i>
<i>15. Jambi</i>	<i>2,9</i>	<i>3,3</i>	<i>3,6</i>	<i>4,2</i>	<i>5,2</i>	<i>6,6</i>
<i>16. Sumatera Selatan</i>	<i>3,2</i>	<i>3,6</i>	<i>3,9</i>	<i>4,5</i>	<i>5,5</i>	<i>6,9</i>
<i>17. Bengkulu</i>	<i>3,1</i>	<i>3,4</i>	<i>3,6</i>	<i>4,0</i>	<i>5,0</i>	<i>6,5</i>
<i>18. Lampung</i>	<i>3,8</i>	<i>4,2</i>	<i>4,5</i>	<i>5,1</i>	<i>6,2</i>	<i>7,8</i>
<i>19. Kep. Bangka Belitung</i>	<i>3,8</i>	<i>4,1</i>	<i>4,4</i>	<i>5,2</i>	<i>6,4</i>	<i>8,1</i>
<i>31. DKI Jakarta</i>	<i>2,4</i>	<i>2,9</i>	<i>3,6</i>	<i>4,7</i>	<i>6,0</i>	<i>7,7</i>
<i>32. Jawa Barat</i>	<i>4,5</i>	<i>4,7</i>	<i>5,0</i>	<i>5,5</i>	<i>6,5</i>	<i>7,9</i>
<i>33. Jawa Tengah</i>	<i>6,3</i>	<i>6,9</i>	<i>7,5</i>	<i>8,2</i>	<i>9,4</i>	<i>11,3</i>
<i>34. DI Yogyakarta</i>	<i>8,9</i>	<i>9,2</i>	<i>9,4</i>	<i>9,7</i>	<i>10,6</i>	<i>12,1</i>
<i>35. Jawa Timur</i>	<i>6,3</i>	<i>7,0</i>	<i>7,6</i>	<i>8,6</i>	<i>10,2</i>	<i>12,6</i>
<i>36. Banten</i>	<i>3,7</i>	<i>3,4</i>	<i>3,3</i>	<i>3,6</i>	<i>4,3</i>	<i>5,8</i>
<i>51. Bali</i>	<i>5,9</i>	<i>6,2</i>	<i>6,8</i>	<i>7,5</i>	<i>8,6</i>	<i>10,1</i>
<i>52. Nusa Tenggara Barat</i>	<i>3,5</i>	<i>3,8</i>	<i>4,2</i>	<i>4,8</i>	<i>5,7</i>	<i>6,8</i>
<i>53. Nusa Tenggara Timur</i>	<i>4,4</i>	<i>4,6</i>	<i>5,0</i>	<i>5,4</i>	<i>6,1</i>	<i>7,2</i>
<i>61. Kalimantan Barat</i>	<i>2,8</i>	<i>3,2</i>	<i>3,7</i>	<i>4,4</i>	<i>5,3</i>	<i>6,5</i>
<i>62. Kalimantan Tengah</i>	<i>2,4</i>	<i>2,6</i>	<i>3,0</i>	<i>3,6</i>	<i>4,5</i>	<i>5,9</i>
<i>63. Kalimantan Selatan</i>	<i>3,3</i>	<i>3,7</i>	<i>4,1</i>	<i>4,7</i>	<i>5,7</i>	<i>7,2</i>
<i>64. Kalimantan Timur</i>	<i>2,1</i>	<i>2,4</i>	<i>2,8</i>	<i>3,6</i>	<i>4,7</i>	<i>6,3</i>
<i>71. Sulawesi Utara</i>	<i>5,1</i>	<i>5,6</i>	<i>6,1</i>	<i>7,1</i>	<i>8,7</i>	<i>10,7</i>
<i>72. Sulawesi Tengah</i>	<i>3,0</i>	<i>3,3</i>	<i>3,7</i>	<i>4,4</i>	<i>5,4</i>	<i>6,7</i>
<i>73. Sulawesi Selatan</i>	<i>4,5</i>	<i>4,8</i>	<i>5,2</i>	<i>6,0</i>	<i>6,9</i>	<i>8,2</i>
<i>74. Sulawesi Tenggara</i>	<i>2,9</i>	<i>3,1</i>	<i>3,4</i>	<i>4,0</i>	<i>4,8</i>	<i>5,9</i>
<i>75. Gorontalo</i>	<i>3,3</i>	<i>3,7</i>	<i>4,3</i>	<i>5,3</i>	<i>6,5</i>	<i>8,0</i>
<i>81. Maluku</i>	<i>4,0</i>	<i>4,2</i>	<i>4,5</i>	<i>5,1</i>	<i>6,1</i>	<i>7,6</i>
<i>82. Maluku Utara</i>	<i>2,8</i>	<i>3,0</i>	<i>3,3</i>	<i>3,8</i>	<i>4,7</i>	<i>5,8</i>
<i>94. Papua</i>	<i>1,1</i>	<i>1,4</i>	<i>1,8</i>	<i>2,7</i>	<i>3,9</i>	<i>5,6</i>
<i>INDONESIA</i>	<i>4,7</i>	<i>5,0</i>	<i>5,3</i>	<i>5,9</i>	<i>7,0</i>	<i>8,5</i>

Susunan umur setiap provinsi juga mengalami perubahan cukup besar. Susunan umur penduduk di beberapa provinsi sedikit lebih tua dari provinsi lainnya artinya proporsi penduduk yang berusia lanjut, 65 tahun ke atas, lebih tinggi. Persentase penduduk 65 tahun ke atas di lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara, pada tahun 2025 telah mencapai lebih dari 10 persen. Jadi kelima provinsi ini, pada tahun 2025 sudah bisa dikategorikan sebagai provinsi penduduk tua (*aging population*). Sebaliknya, persentase penduduk 0-14 tahun untuk kurun waktu yang sama di lima provinsi itu terendah di Indonesia, Jawa Tengah 23 persen, DI Yogyakarta 16,5 persen, Jawa Timur 18,1 persen, Bali 19,6 persen, dan Sulawesi Utara 20,1 persen.

3.3. Net Reproduction Rate (NRR)

NRR merupakan salah satu hasil (*output*) proyeksi penduduk yang sering diinterpretasikan sebagai banyaknya anak perempuan yang dilahirkan oleh setiap perempuan dalam masa reproduksinya. Sering ditanyakan, kapankah Indonesia akan mencapai $NRR = 1$, tingkat *replacement level*, yaitu saat dimana satu ibu diganti secara tepat oleh satu bayi wanita. Dengan asumsi penurunan fertilitas dan mortalitas serta perolehan susunan umur seperti telah diuraikan di atas, Indonesia akan mencapai $NRR = 1$ pada sekitar tahun 2015. Pada saat itu bukannya berarti laju pertumbuhan penduduk sama dengan nol, atau penduduk tanpa pertumbuhan, tetapi penduduk akan tetap bertambah dengan laju pertumbuhan yang relatif stabil. Beberapa provinsi sudah mencapai tingkat itu jauh sebelum tahun 2015, misalnya DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Utara, yaitu pada periode 1996-1999. Pada akhir periode proyeksi hampir semua provinsi telah mencapai replacement level. Pada Tabel 3.6 disajikan NRR Indonesia dan juga NRR setiap provinsi.

Tabel 3.6. *Estimasi Net Reproduction Rate (NRR) menurut Provinsi, 2000-2025*

Provinsi	Periode				
	2000-2005 (2002)	2005-2010 (2007)	2010-2015 (2012)	2015-2020 (2017)	2020-2025 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Nanggroe Aceh Darussalam	1,19	1,10	1,05	1,03	1,02
12. Sumatera Utara	1,28	1,18	1,10	1,05	1,01
13. Sumatera Barat	1,22	1,14	1,08	1,03	1,00
14. Riau	1,19	1,11	1,06	1,02	0,99
15. Jambi	1,16	1,09	1,04	1,01	0,98
16. Sumatera Selatan	1,15	1,06	1,00	0,99	1,00
17. Bengkulu	1,11	1,03	0,99	0,96	0,95
18. Lampung	1,18	1,09	1,03	1,00	0,97
19. Kep. Bangka Belitung	1,08	1,02	0,99	0,97	0,96
31. DKI Jakarta	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72
32. Jawa Barat	1,06	1,02	1,00	0,99	0,99
33. Jawa Tengah	1,06	1,02	1,00	0,98	0,97
34. DI Yogyakarta	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66
35. Jawa Timur	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77
36. Banten	1,15	1,09	1,04	1,01	0,99
51. Bali	0,89	0,89	0,90	0,90	0,90
52. Nusa Tenggara Barat	1,18	1,10	1,05	1,01	0,99
53. Nusa Tenggara Timur	1,38	1,25	1,15	1,06	1,00
61. Kalimantan Barat	1,24	1,14	1,07	1,02	0,98
62. Kalimantan Tengah	1,12	1,05	1,01	0,99	0,98
63. Kalimantan Selatan	1,01	0,99	0,98	0,97	0,96
64. Kalimantan Timur	1,10	1,05	1,02	1,00	0,98
71. Sulawesi Utara	0,94	0,91	0,89	0,89	0,88
72. Sulawesi Tengah	1,10	1,05	1,02	1,00	0,99
73. Sulawesi Selatan	1,08	1,04	1,02	1,00	0,99
74. Sulawesi Tenggara	1,33	1,21	1,12	1,06	1,01
75. Gorontalo	1,08	1,04	1,02	1,00	1,00
81. Maluku	1,28	1,15	1,06	1,00	0,95
82. Maluku Utara	1,24	1,13	1,05	0,99	0,95
94. Papua	1,31	1,20	1,11	1,05	1,00
INDONESIA	1,04	1,01	1,00	0,99	0,98

3.4. Harapan Hidup

Rata-rata Angka Harapan Hidup pada saat lahir (eo) adalah hasil perhitungan proyeksi yang sering dipakai sebagai salah satu Indikator Kesejahteraan Rakyat. Dengan asumsi kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun serta perubahan susunan umur penduduk seperti telah diuraikan di atas maka harapan hidup penduduk Indonesia (laki-laki dan perempuan) naik dari 67,8 tahun pada periode 2000-2005 menjadi 73,6 tahun pada periode 2020-2025. Dalam Tabel 3.7 juga terlihat bahwa variasi harapan hidup menurut provinsi tidak terlalu besar pada awal tahun proyeksi, angka harapan hidup terendah 60,9 tahun untuk Nusa Tenggara Barat dan tertinggi 73,0 tahun untuk DI Yogyakarta. Pada akhir periode proyeksi variasi itu menjadi berkisar antara 70,8 tahun 75,8 tahun untuk provinsi-provinsi yang sama seperti pada awal proyeksi.

Tabel 3.7. *Estimasi Angka Harapan Hidup (eo) menurut Provinsi, 2000-2025*

Provinsi	Periode				
	2000-2005 (2002)	2005-2010 (2007)	2010-2015 (2012)	2015-2020 (2017)	2020-2025 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Nanggroe Aceh Darussalam	67,2	67,3	69,2	71,1	72,8
12. Sumatera Utara	68,6	70,5	72,1	73,2	74,0
13. Sumatera Barat	66,8	69,2	71,2	72,8	73,8
14. Riau	68,0	70,1	71,9	73,2	74,0
15. Jambi	67,0	69,1	70,8	72,0	72,9
16. Sumatera Selatan	66,9	69,2	71,2	72,7	73,6
17. Bengkulu	66,8	68,9	70,7	72,3	73,4
18. Lampung	67,9	70,1	71,8	73,1	73,8
19. Kep. Bangka Belitung	66,9	69,0	70,8	72,1	73,0
31. DKI Jakarta	73,0	74,0	74,7	75,4	75,8
32. Jawa Barat	66,6	69,0	70,9	72,3	73,2
33. Jawa Tengah	68,9	71,0	72,6	73,6	74,2
34. DI Yogyakarta	73,0	74,0	74,7	75,4	75,8
35. Jawa Timur	67,8	70,0	71,9	73,2	73,9
36. Banten	64,6	67,3	69,4	70,9	71,9
51. Bali	70,6	72,4	73,5	74,2	74,6
52. Nusa Tenggara Barat	60,9	64,4	67,2	69,3	70,8
53. Nusa Tenggara Timur	66,1	68,4	70,3	71,9	72,9
61. Kalimantan Barat	66,1	68,5	70,4	71,7	72,5
62. Kalimantan Tengah	67,8	70,0	71,7	72,6	73,0
63. Kalimantan Selatan	64,1	66,9	69,2	70,9	72,1
64. Kalimantan Timur	69,6	71,6	73,1	74,1	74,6
71. Sulawesi Utara	72,3	73,6	74,4	75,1	75,6
72. Sulawesi Tengah	64,5	67,0	69,1	70,8	72,0
73. Sulawesi Selatan	66,3	68,8	70,9	72,4	73,3
74. Sulawesi Tenggara	66,9	69,1	70,8	72,1	72,9
75. Gorontalo	66,3	68,7	70,7	72,0	72,8
81. Maluku	65,3	67,7	69,8	71,3	72,5
82. Maluku Utara	63,3	66,3	68,7	70,5	71,9
94. Papua	66,1	68,4	70,3	71,8	72,7
INDONESIA	67,8	69,8	71,5	72,8	73,6

3.5. Urbanisasi

Urbanisasi adalah persentase penduduk perkotaan. Urbanisasi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pertumbuhan alami penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, dan reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan. Proyeksi penduduk daerah perkotaan pada proyeksi ini tidak dilakukan dengan membuat asumsi untuk ketiga faktor tersebut, tetapi berdasarkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan daerah perdesaan (*Urban Rural Growth Difference/URGD*). Namun begitu, dengan membuat asumsi URGD untuk masa yang akan datang, berarti proyeksi ini secara tidak langsung juga sudah mempertimbangkan ketiga faktor tersebut.

Tabel 3.8 menyajikan tingkat urbanisasi per provinsi dari tahun 2000 sampai dengan 2025. Untuk Indonesia, tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 68 persen pada tahun 2025. Untuk beberapa provinsi, terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Jawa pada tahun 2025 sudah di atas 80 persen, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten.

Tabel 3.8. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan per Provinsi, 2000-2025

<i>Provinsi</i>	<i>2000</i>	<i>2005</i>	<i>2010</i>	<i>2015</i>	<i>2020</i>	<i>2025</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
<i>11 Nanggroe Aceh Darussalam</i>	<i>23,6</i>	<i>28,8</i>	<i>34,3</i>	<i>39,7</i>	<i>44,9</i>	<i>49,9</i>
<i>12 Sumatera Utara</i>	<i>42,4</i>	<i>46,1</i>	<i>50,1</i>	<i>54,4</i>	<i>58,8</i>	<i>63,5</i>
<i>13 Sumatera Barat</i>	<i>29,0</i>	<i>34,3</i>	<i>39,8</i>	<i>45,3</i>	<i>50,6</i>	<i>55,6</i>
<i>14 Riau</i>	<i>43,7</i>	<i>50,4</i>	<i>56,6</i>	<i>62,1</i>	<i>66,9</i>	<i>71,1</i>
<i>15 Jambi</i>	<i>28,3</i>	<i>32,4</i>	<i>36,5</i>	<i>40,6</i>	<i>44,5</i>	<i>48,4</i>
<i>16 Sumatera Selatan</i>	<i>34,4</i>	<i>38,7</i>	<i>42,9</i>	<i>47,0</i>	<i>50,9</i>	<i>54,6</i>
<i>17 Bengkulu</i>	<i>29,4</i>	<i>35,2</i>	<i>41,0</i>	<i>46,5</i>	<i>51,7</i>	<i>56,5</i>
<i>18 Lampung</i>	<i>21,0</i>	<i>27,0</i>	<i>33,3</i>	<i>39,8</i>	<i>46,2</i>	<i>52,2</i>
<i>19 Kep. Bangka Belitung</i>	<i>43,0</i>	<i>47,8</i>	<i>52,2</i>	<i>56,5</i>	<i>60,3</i>	<i>63,9</i>
<i>31 DKI Jakarta</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>32 Jawa Barat</i>	<i>50,3</i>	<i>58,8</i>	<i>66,2</i>	<i>72,4</i>	<i>77,4</i>	<i>81,4</i>
<i>33 Jawa Tengah</i>	<i>40,4</i>	<i>48,6</i>	<i>56,2</i>	<i>63,1</i>	<i>68,9</i>	<i>73,8</i>
<i>34 DI Yogyakarta</i>	<i>57,6</i>	<i>64,3</i>	<i>70,2</i>	<i>75,2</i>	<i>79,3</i>	<i>82,8</i>
<i>35 Jawa Timur</i>	<i>40,9</i>	<i>48,9</i>	<i>56,5</i>	<i>63,1</i>	<i>68,9</i>	<i>73,7</i>
<i>36 Banten</i>	<i>52,2</i>	<i>60,2</i>	<i>67,2</i>	<i>73,0</i>	<i>77,7</i>	<i>81,5</i>
<i>51 Bali</i>	<i>49,7</i>	<i>57,7</i>	<i>64,7</i>	<i>70,7</i>	<i>75,6</i>	<i>79,6</i>
<i>52 N T B</i>	<i>34,8</i>	<i>41,9</i>	<i>48,8</i>	<i>55,2</i>	<i>61,0</i>	<i>66,0</i>
<i>53 N T T</i>	<i>15,4</i>	<i>18,0</i>	<i>20,7</i>	<i>23,5</i>	<i>26,4</i>	<i>29,3</i>
<i>61 Kalimantan Barat</i>	<i>24,9</i>	<i>27,8</i>	<i>31,1</i>	<i>34,8</i>	<i>39,0</i>	<i>43,7</i>
<i>62 Kalimantan Tengah</i>	<i>27,5</i>	<i>34,0</i>	<i>40,7</i>	<i>47,2</i>	<i>53,3</i>	<i>58,8</i>
<i>63 Kalimantan Selatan</i>	<i>36,2</i>	<i>41,5</i>	<i>46,7</i>	<i>51,6</i>	<i>56,3</i>	<i>60,6</i>
<i>64 Kalimantan Timur</i>	<i>57,7</i>	<i>62,2</i>	<i>66,2</i>	<i>69,9</i>	<i>73,1</i>	<i>75,9</i>
<i>71 Sulawesi Utara</i>	<i>36,6</i>	<i>43,4</i>	<i>49,8</i>	<i>55,7</i>	<i>61,1</i>	<i>65,7</i>
<i>72 Sulawesi Tengah</i>	<i>19,3</i>	<i>21,0</i>	<i>22,9</i>	<i>24,9</i>	<i>27,3</i>	<i>29,9</i>
<i>73 Sulawesi Selatan</i>	<i>29,4</i>	<i>32,2</i>	<i>35,3</i>	<i>38,8</i>	<i>42,6</i>	<i>46,7</i>
<i>74 Sulawesi Tenggara</i>	<i>20,8</i>	<i>23,0</i>	<i>25,6</i>	<i>28,5</i>	<i>31,8</i>	<i>35,5</i>
<i>75 Gorontalo</i>	<i>25,4</i>	<i>31,3</i>	<i>37,0</i>	<i>42,8</i>	<i>48,2</i>	<i>53,2</i>
<i>81 Maluku</i>	<i>25,3</i>	<i>26,1</i>	<i>26,9</i>	<i>27,9</i>	<i>28,8</i>	<i>29,9</i>
<i>82 Maluku Utara</i>	<i>28,9</i>	<i>29,7</i>	<i>30,6</i>	<i>31,5</i>	<i>32,5</i>	<i>33,6</i>
<i>94 Papua</i>	<i>22,2</i>	<i>22,8</i>	<i>23,5</i>	<i>24,3</i>	<i>25,1</i>	<i>26,0</i>
<i>Indonesia</i>	<i>42,0</i>	<i>48,3</i>	<i>54,2</i>	<i>59,5</i>	<i>64,2</i>	<i>68,3</i>

BAB IV

PENUTUP

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi ini dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan data kependudukan di masa mendatang yang utamanya untuk dasar perencanaan pembangunan nasional dan regional jangka panjang. Besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk hasil proyeksi ini sangat tergantung dari asumsi-asumsi yang digunakan, sehingga angka-angka tersebut bukan merupakan angka yang mutlak akan tercapai, tetapi lebih merupakan pedoman tentang apa yang terjadi jika asumsi-asumsi yang digunakan terpenuhi. Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi ini telah melalui proses penghitungan yang teliti, namun hasil perhitungan juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul, misalnya kesalahan dalam pengumpulan data, proses memperkirakan komponen perubahan penduduk dan teknik perhitungan proyeksi yang dipakai, oleh karena itu benar atau tidaknya asumsi dan hasil proyeksi ini baru dapat dibuktikan jika tersedia angka pembandingan, misalnya angka yang akan diperoleh dari hasil Sensus Penduduk 2010, angka hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015, dan sensus atau survei penduduk di masa yang akan datang.

Pada masa yang akan datang proyeksi ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan baik dari segi asumsi maupun metode, terutama jika tersedia informasi baru yang diperkirakan dapat meningkatkan kecermatan.